

**Mengajar Sembari Belajar: Sebuah *Interpretative Phenomenological Analysis*
tentang Pengalaman Pengajar Muda Gerakan Indonesia Mengajar**

Disusun Oleh:

Ananda Prahardini Purnamasari

15010111130069

ABSTRAK

Gerakan Indonesia Mengajar adalah suatu gerakan sosial yang dilaksanakan selama satu tahun oleh pengajar muda untuk membantu mengisi kekosongan guru di lokasi terpencil, sekaligus mendorong perkembangan daerah di lokasi tersebut. Menjadi relawan merupakan sebuah pilihan pribadi untuk memberikan komitmen waktu dan tenaga untuk kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan keuntungan finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman pengajar muda yang berpartisipasi dalam Gerakan Indonesia Mengajar. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis, khususnya dengan analisis data *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) dipilih sebagai metode penelitian karena kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam semi-terstruktur pada tiga orang pengajar muda yang ditempatkan di Banggai, Rote, dan Sangihe. Pada penelitian ini ditemukan tiga tema induk, yaitu (1) Konsep diri, (2) Makna menjadi pengajar muda, dan (3) Makna pendidikan anak, serta ditemukannya dua tema khusus, yaitu (1) Rasa nasionalisme, dan (2) Kelekatan dengan keluarga angkat. Partisipan penelitian ini mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pengajar muda yang didasarkan oleh motivasi internal, serta motivasi eksternal. Pada penelitian ini juga ditemukan transformasi diri dan pembentukan konsep diri positif dalam pribadi pengajar muda, dan kemandirian masyarakat lokasi penempatan sebagai perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut dengan kehadiran pengajar muda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dalam bidang psikologi sosial dan psikologi pendidikan.

Kata kunci: mengajar, Gerakan Indonesia Mengajar, relawan, pengalaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat penting demi kemajuan dan perubahan suatu bangsa. Melalui pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang kehidupan budaya lainnya (Hasbullah, 2013). Oleh sebab itu, sektor pendidikan tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah. Berdasarkan UU No. 20 Th. 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara etimologis, pendidikan merupakan sebuah proses memimpin atau membimbing. Menurut beberapa definisi pendidikan yang ada, UNESCO (Delors, et al., 1996; Delors, 2013) merumuskan adanya empat pilar pendidikan, yaitu, *learning how to know* (belajar mengetahui), *learning how to do* (belajar melakukan), *learning how to live together* (belajar untuk hidup berdampingan) dan *learning how to be* (belajar untuk menjadi). Selama manusia hidup, manusia dapat belajar hampir segala hal, itulah yang menjadi jiwa pendidikan.

Pendidikan adalah fenomena manusia yang fundamental, yang mempunyai sifat konstruktif dalam kehidupan manusia. Peters (2010) menyebutkan bahwa pendidikan tidak mengenal akhir, karena seorang yang berpendidikan tidak akan berhenti pada satu solusi pada suatu persoalan tertentu, tetapi akan berusaha melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Seorang yang terdidik tidak hanya memiliki pengetahuan, akan tetapi juga memiliki pemahaman terhadap pengetahuan tersebut, dan terlihat kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari (Peters, 2010).

Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter suatu bangsa, dan dengan meningkatnya kemajuan teknologi, lembaga pendidikan juga diharapkan mampu membentuk bangsa yang dapat diadu di tingkat global atau internasional. Banyak negara yang memfokuskan pengembangannya dalam sektor pendidikan, termasuk Indonesia. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha memperbaiki proses pendidikan dalam upaya mencapai cita-cita bangsa tersebut.

Akan tetapi, kualitas pendidikan di Indonesia dirasa masih belum memenuhi harapan setiap warga negara, tidak hanya oleh pemerintah sendiri. Hal ini dibuktikan oleh Coughlan (2015), negara-negara Asia menempati lima posisi teratas sementara negara-negara Afrika dengan peringkat terendah, namun Indonesia menempati peringkat ke-8 dari bawah (peringkat 69 dari 78 negara). Pendidikan yang dijanjikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlihat terlaksana secara merata di seluruh Indonesia, sehingga pendidikan berkualitas hanya diperoleh di kota-kota besar Indonesia.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik, 2014), tugas sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan telah mencapai banyak peningkatan setelah dilaksanakannya program pemerintah wajib belajar 9 tahun, yaitu 97% anak-anak di Indonesia dapat bersekolah di Sekolah Dasar (SD). Meskipun demikian, sebanyak 4.5 juta anak Indonesia usia 7-18 tahun belum mendapatkan pendidikan, dengan 270.000 anak-anak di usia sekolah dasar (7-12 tahun), anak difabel, serta anak-anak dari masyarakat ekonomi rendah, dan anak-anak di pedesaan memiliki kecenderungan untuk putus sekolah (UNICEF, n.d.).

Kondisi negara Indonesia—yang secara geografis merupakan negara kepulauan—adalah salah satu penyebab adanya kesenjangan sosial, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan. Beberapa lokasi sekolah yang belum didukung oleh infrastruktur yang layak, fasilitas yang kurang memadai, akses transportasi, juga berada di lokasi yang terisolasi atau terpencil—atau yang lebih dikenal dengan lokasi 3T, yaitu terluar, terdepan dan tertinggal—mengakibatkan sulitnya persebaran tenaga pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data UNESCO (dalam Suastha, 2016), tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia meningkat tajam, namun mutu pendidikan yang didapat setiap anak belum setara.

Guru adalah elemen penting yang dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005). Menurut definisi tersebut, dapat dipahami bahwa melalui tenaga pendidik, atau guru, maka pengetahuan dan pendidikan karakter anak bangsa

dapat berubah menjadi lebih baik, dan dengan kata lain, peran guru sangat besar dalam membentuk masyarakat yang terdidik dan terpelajar.

Keputusan untuk menjadi guru akan berbeda pada setiap orang. Zeichner & Liston (2014) menyebutkan bahwa beberapa guru memandang tindakan mengajar hanya sebagai rutinitas atau pekerjaannya, beberapa yang lain melihat sebagai profesinya, dan beberapa sisanya memandang tindakan mengajar sebagai sebuah 'panggilan' jiwa. Pugach (2006) menyebutkan bahwa individu yang memilih untuk mengajar tidak hanya akan memperoleh kepuasan dari penghargaan yang diberikan oleh profesi tersebut, tetapi juga ketika mampu memenuhi tuntutan-tuntutan dari profesi itu. Menjadi guru bukanlah suatu hal yang mudah, seperti yang dikatakan oleh Black (dalam Nicholls, 2004), mengajar adalah seni dan keterampilan yang didapat dan dipelajari melalui kerja keras. Selain itu, Palmer (dalam Zeichner & Liston, 2014) mengemukakan bahwa guru yang baik tidak melupakan diri, bahan pelajaran, dan siswa sebagai kesatuan dalam proses pembelajaran, yang termanifestasi dalam kehidupannya dan siswanya. Selain itu, mereka juga mampu mendorong siswanya dalam membangun dunia mereka sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Irianto & Subandi (2015) tentang kebahagiaan guru di pedalaman Papua, guru menunjukkan kebahagiaan ketika siswa-siswanya dapat mengikuti pelajaran yang diberikan dan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, ketika dapat menunjukkan identitas guru secara langsung di pedalaman, dan ketika adanya kesatuan kerja diantara para guru, serta ketika mendapat dukungan dari masyarakat setempat maupun keluarga mereka. Kohl (dalam Adendorff dkk., 2010) mengemukakan bahwa terdapat

perasaan yang membahagiakan ketika menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan anak didik, dan hal itulah yang menjadi alasan seseorang untuk mengajar (menjadi guru) dan sekaligus imbalan atas tindakan mengajar.

Namun pada kenyataan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, masih banyak ditemui persoalan guru yang enggan mengajar di desa, di daerah terpencil atau di pelosok Indonesia. Hal inilah yang menjadi penyebab kurang meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Bahri (2011), tantangan menjadi guru di wilayah pedalaman dapat disimpulkan menjadi 2 (dua), yaitu (1) tantangan kondisi internal, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan hidup, kesempatan untuk mengembangkan karir, dan peningkatan kesejahteraan guru menjadi suatu hal yang menyulitkan; (2) tantangan kondisi eksternal, yaitu sulitnya akses informasi, komunikasi, transportasi, dan jalan yang menjadi kendala. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menjadi guru di daerah pelosok atau di pedalaman merupakan keputusan menjadi guru sebagai 'panggilan jiwa'.

Kohl (dalam Adendorff dkk., 2010) menyatakan bahwa dorongan untuk mengajar pada dasarnya bersifat altruistik dan mewakili keinginan untuk membagi nilai-nilai yang diyakini, dan untuk memberdayakan orang lain. Keputusan untuk mengisi jumlah kekurangan guru di daerah pedalaman sebagai suatu usaha peningkatan pendidikan di Indonesia dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah (ORNOP). Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan program SM3T atau Sarjana Mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Program SM3T adalah program pemerintah untuk mencetak guru profesional dan berkualitas untuk daerah pinggiran yang bertujuan

untuk mengisi kekurangan guru pada daerah-daerah yang terkategori 3T. Dalam 5 tahun pelaksanaannya, pemerintah telah mengirimkan 7962 guru ke daerah terpencil melalui program SM3T (RISTEKDIKTI, 2016). Namun pada kenyataannya, jumlah kurangnya guru di Indonesia mencapai 300.000 orang (Fadhilah, 2017).

Selain kebijakan pemerintah berupa program SM3T, organisasi non pemerintah, yaitu Yayasan Indonesia Mengajar telah melaksanakan suatu gerakan sosial berbasis pendidikan. Gerakan sosial adalah salah satu cara yang dilakukan dalam upaya mencapai suatu perubahan sosial terhadap adanya fenomena atau persoalan sosial. Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) termasuk gerakan sosial di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan. Gerakan ini memandang pendidikan dapat memberikan sumbangan terhadap perubahan sosial di suatu kelompok masyarakat, di mana yang dimaksud adalah masyarakat di daerah terpencil.

Penelitian ini berfokus pada Gerakan Indonesia Mengajar (GIM). GIM bertujuan untuk mencapai suatu perubahan sosial pada masyarakat tertentu (yaitu lokasi penempatan tugas, yang merupakan lokasi terpencil Indonesia) dengan mengirimkan pengajar muda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di lokasi tersebut. Pengajar muda (PM) sebagai *agent of change* diharapkan dapat mengubah pola pikir individu serta memberikan pencerahan pada individu mengenai hal-hal yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Pendidikan dapat memberikan kontribusi pada perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Masyarakat yang memiliki

sistem pendidikan yang berkualitas akan mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat tersebut.

GIM merupakan satu gerakan dimana anak-anak muda diundang untuk menjadi guru SD yang berada di desa terpencil selama satu tahun. GIM adalah bentuk nyata dari usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gerakan ini sepenuhnya percaya bahwa hadirnya lulusan terbaik Indonesia sebagai guru, mendorong peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Misi GIM adalah membantu mengisi kekosongan guru berkualitas di daerah yang membutuhkan, serta menjadi wahana belajar kepemimpinan bagi anak-anak muda Indonesia agar memiliki kompetensi kelas dunia dan pemahaman masyarakat akar rumput yang utuh (Indonesia Mengajar, n.d.).

Tujuan utama GIM adalah mengembalikan fungsi pendidikan sebagai instrumen untuk meningkatkan status sosial masyarakat. Gerakan ini terinspirasi dari program pemerintah Pengiriman Tenaga Mahasiswa (PTM) pada tahun 1950. Dalam kurun waktu 1951—1952, PTM berhasil mengirimkan 1.487 mahasiswa untuk mengajar di 161 sekolah lanjutan tingkat atas di 97 daerah terpencil di luar Jawa. Akibatnya, jumlah mahasiswa dari kalangan masyarakat biasa yang terinspirasi atau terbantu untuk kuliah meningkat, karena sebelumnya hanya bangsawan dan orang-orang mampu yang bisa menjadi mahasiswa. Hal ini membuktikan, PTM berhasil meningkatkan status masyarakat miskin dan tidak terdidik menjadi kalangan menengah yang mandiri secara ekonomi dan sosial (Kompas.com, 2010).

Peningkatan mutu pendidikan untuk peningkatan kualitas bangsa merupakan upaya yang selalu dilakukan di seluruh dunia. Di Jepang, sejak tahun 1950-an, pemerintah dan para tenaga pendidikan berkomitmen untuk memperbaiki kondisi pendidikan di daerah terpencil. Pada tahun 1954, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur Peningkatan Pendidikan di Daerah Terpencil dan Terisolasi. Melalui upaya tersebut, pada pertengahan 1980-an, masalah sekolah dan pendidikan di daerah terpencil hampir terselesaikan, dan pada 1982, Presiden Asosiasi Pendidikan di Pedesaan dan Daerah Terpencil menyatakan bahwa di daerah pegunungan dan pulau terpencil sudah menyediakan pendidikan yang sama seperti di daerah perkotaan (Saito, 2012).

Model pembangunan wilayah pedesaan melalui pendidikan pernah dijalankan juga oleh BRAC (The Bangladesh Rural Advancement Committee), dengan mengadakan proyek pada tahun 1985 untuk mendidik anak-anak di daerah pedesaan. Proyek tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Bermula dari penyediaan literasi dasar, baca-tulis-hitung bagi anak-anak berusia delapan hingga sepuluh tahun di 22 desa, upaya tersebut mendorong peningkatan sekolah yang pesat. Pada tahun 1998, sekitar 34.000 sekolah melayani lebih dari 1.2 juta anak (Moulton, 2001).

Yayasan Indonesia Mengajar (Indonesia Mengajar, n.d.) memfokuskan GIM kepada anak-anak di sekolah dasar, yang didasari oleh fakta bahwa 66% sekolah dasar di Indonesia kekurangan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, pendidikan bagi anak-anak merupakan hal yang mendasar yang akan mengantarkan mereka pada pendidikan yang lebih tinggi di masa mendatang. Yayasan Indonesia

Mengajar (IM) menempatkan warga negara Indonesia yang telah lulus kuliah Strata 1 (S1) yang berusia di bawah 29 tahun untuk menjadi pengajar muda (PM) dalam Gerakan Indonesia Mengajar.

Selain Indonesia Mengajar, program peningkatan kualitas pendidikan serupa banyak ditemukan di beberapa negara di dunia, salah satunya *Teach for America* (TFA). TFA didirikan pada tahun 1989 untuk mengatasi persoalan ketimpangan pendidikan yang dihadapi anak-anak di masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Amerika Serikat dengan menyediakan guru-guru untuk sekolah-sekolah di komunitas tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raymond, dkk. (2001), ditemukan bahwa memiliki guru TFA memengaruhi secara positif terhadap nilai tes siswa. Secara umum, keberadaan guru TFA tidak hanya menunjukkan hasil belajar positif pada siswa mereka, tapi juga menunjukkan konsistensi hasil belajar yang lebih besar (Raymond, Fletcher, & Luque, 2001). Selain itu, guru TFA memberikan dampak positif pada prestasi matematika sebesar 15% dari standar, namun tidak berdampak pada prestasi membaca (Glazerman, Mayer, & Decker, 2006).

Dalam rentang waktu 5 tahun sejak GIM pertama kali dilaksanakan (2010—2015), jumlah relawan pengajar muda meningkat tajam dari 11.017 menjadi lebih kurang 77.000 pendaftar, dan yang telah tercatat sebagai pengajar muda dalam 10 angkatan GIM mencapai 600 orang (Librianty, 2015). Untuk dapat melaksanakan Gerakan Indonesia Mengajar, pengajar muda harus melewati empat proses, yaitu fase rekrutmen dan seleksi, fase pelatihan, fase penempatan, dan fase paska penugasan. Salah satu syarat menjadi PM adalah siap mengabdikan dan bersedia

ditempatkan di lokasi terpencil Indonesia. Maka pada saat mendaftar, calon PM memahami bahwa dibutuhkan kesukarelaannya dalam pengabdian dan komitmennya bertugas selama satu tahun di lokasi terpencil dengan berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi.

Pengajar muda adalah mereka yang telah melewati pendidikan Strata 1 (S-1) yang diharapkan mampu untuk mengisi kekurangan guru berkualitas di daerah pelosok, serta mampu membantu pengembangan daerah di lokasi tersebut. Menurut Musick & Wilson (2008), pendidikan—baik dalam bentuk kemampuan kognitif, keterampilan organisasi, atau kesadaran terhadap persoalan-persoalan sosial—dapat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan sukarela.

Menurut Kearney (dalam Rochester, Payne, & Howlett, 2010) kesukarelawanan adalah komitmen waktu dan tenaga untuk kepentingan masyarakat, dan dapat berupa banyak bentuk. Tindakan ini dilakukan secara bebas dan berdasarkan pilihan pribadi tanpa memperhatikan keuntungan finansial. Keputusan untuk menjadi sukarelawan berkorelasi positif dengan altruisme, serta dengan kepedulian terhadap reputasi atau citra sosial (Carpenter & Myers, 2010). Altruisme adalah perilaku prososial yang bertujuan untuk kesejahteraan orang lain (Batson, Ahmad, & Tsang, 2002). Menurut Thoits & Hewitt (2001), aksi sukarela meningkatkan kesejahteraan diri seseorang, dan seseorang dengan kesejahteraan diri yang tinggi akan melibatkan dirinya lagi dalam aksi-aksi sukarela yang lain.

Alasan seseorang untuk melakukan pekerjaan sukarela juga dipengaruhi dari perubahan masa-masa perkembangan hidupnya. Hal ini disebabkan seseorang mengalami perubahan minat, memiliki kebutuhan yang berbeda, hubungan sosial

yang berubah, dan sumber daya yang dimilikipun berbeda (Musick & Wilson, 2008). Selain itu, disebutkan pula oleh Musick & Wilson (2008), ada perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan dalam keinginan untuk melakukan kesukarelawanan. Menurut Costa & Kahn (dalam Musick & Wilson, 2008) semakin besar heterogenitas etnis dari komunitas tempat tinggal seseorang, semakin rendah peluang untuk menjadi sukarelawan.

Selama fase penempatan, PM tinggal bersama masyarakat dan terlibat dengan mereka, ikut serta dalam aktivitas sosial, dan menginspirasi untuk meningkatkan pendidikan di lokasi tersebut. Mereka harus memunculkan kesadaran bahwa pendidikan merupakan dasar untuk merubah hidup dan masa depan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, PM harus mampu terlibat dengan sekolah, masyarakat, para orang tua, dan pemimpin daerah. Selama pelaksanaan Gerakan Indonesia Mengajar, PM menemui banyak kesulitan, namun mereka dapat melihat potensi masyarakat, dan mendorong masyarakat untuk bergerak melakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti mendirikan perpustakaan, mengajarkan bagaimana untuk bertahan hidup, bahkan hal-hal seperti membangun pagar sekolah (Harits, Chudy, & Plische, 2016).

Mereka harus dapat menggunakan semua potensi untuk mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan pendidikan. Hal ini senada dengan pendapat Clary dkk. (dalam Rochester dkk. 2010) yang menyebutkan bahwa kesukarelawanan seringkali tidak mudah, seseorang harus melewati beberapa rintangan untuk menjadi sukarelawan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengangkat pertanyaan utama penelitian ini, yaitu bagaimana pengalaman partisipan dalam mengikuti Gerakan Indonesia Mengajar selama satu tahun pelaksanaannya di lokasi terpencil Indonesia?

Pertanyaan utama tersebut kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang dapat membantu peneliti menggali makna pengalaman ini, yaitu:

- (1) Apa motivasi pengajar muda untuk turut serta dalam kegiatan Gerakan Indonesia Mengajar (GIM)? dan,
- (2) Apa saja perubahan yang terjadi dalam pribadi pengajar muda, juga perubahan yang terjadi pada masyarakat lokasi pelaksanaan GIM?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian fenomenologis adalah untuk memahami pengalaman yang dialami seseorang dalam konteks tertentu dan waktu tertentu, bukan sebagai suatu hal yang umum terjadi dalam kehidupan. Penelitian fenomenologis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman pengajar muda selama berpartisipasi dalam Gerakan Indonesia Mengajar, dari fase perekrutan dan seleksi hingga fase paska penugasan. Dalam penelitian ini, pengajar muda didefinisikan sebagai partisipan dalam Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) yang sudah menyelesaikan tugas selama satu tahun.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan sumbangan ilmu bagi psikologi sosial dan psikologi pendidikan. Bagi psikologi sosial, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang dampak gerakan sosial terhadap tingkah laku di suatu kelompok masyarakat. Dalam psikologi pendidikan, pelaksanaan Gerakan Indonesia Mengajar diharapkan mampu memberikan proses pendidikan baru yang dapat digunakan dalam pengembangan sektor pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Subjek atau Partisipan

Penelitian ini akan menambah pengetahuan subjek dalam memaknai pengalamannya mengikuti Gerakan Indonesia Mengajar yang dapat membantunya dalam evaluasi pengembangan diri subjek.

b. Pemerintah dan Institusi Pendidikan

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam mengadopsi Gerakan Indonesia Mengajar sebagai salah satu solusi permasalahan kekurangan tenaga pendidik di lokasi terpencil Indonesia. Selain itu, proses pendidikan GIM dapat memberikan pertimbangan pemerintah dalam perkembangan sistem pendidikan di Indonesia.

c. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi, serta masukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Gerakan Indonesia Mengajar, dan pengaruh pendidikan dalam perubahan sosial, serta penelitian mengenai pengembangan pendidikan di Indonesia.